

Inspirasi

JURNAL ILMIAH MULTI SCIENCE

ISSN 0854-4808



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH BENGKULU

PLANNING PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN
(Kajian Program Hkm Dalam Perspektif Otonomi Daerah)
Suratman

STRUKTUR USAHATANI CABAI (*Capsicum Annum*) AKIBAT PENERAPAN TEKNOLOGI MULSA
PLASTIK HITAM PERAK DI KABUPATEN REJANG LEBONG
Ririn Harini dan Jon Yawahar

UJIAN NASIONAL TERHADAP KUALITAS KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Hasmi Suyuthie

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN YANG BERKELANJUTAN
Hasanawi dan Wismalinda Rita

FENOMENA INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI KEKAYAAN BARU ORGANISASI DALAM
MENGHADAPI TUNTUTAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN DI ERA GLOBALISASI
Yudi Partama Putra

STUDI PENJAJAKAN DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KOMUNITAS
Purwaka

POLA AMAR MA'RUF, MABADI KHAYRUL UMMAH DAN PANCASILAH
Syamsul Huda

PEMBERIAN MOTIVASI ADALAH SALAH SATU FAKTOR PENTING DALAM MENCAPAI
KEBERHASILAN BAGI WARGA BELAJAR PENDIDIKAN NON FORMAL
M. Ilham Abdullah

ANALISIS ACTIVITY-BASED COSTING SEBAGAI ALTERNATIF DALAM USAHA
PENGENDALIAN BIAYA DAN PENINGKATAN EFISIENSI PADA PT. BUKIT ANGKASA MAKMUR
Furqonti Ranidiah

USAHA MENGURANGI BENCANA AKIBAT TSUNAMI
Muhammad Ali

STUDI KOMPARATIF TENTANG SHU DALAM KOPERASI KONVENSIONAL DENGAN
KOPERASI SYARIAH
Yusmaniarti

PEMASARAN KORAN DAERAH DI SUMATRA SELATAN MEMPROMOSIKAN SURATKABAR
LINGGAU POS, MELALUI MEDIA MASA MAUPUN KOMUNIKASI INTERPERSONAL
Isnawijayani

PERANGKAT LUNAK BANTU INTEGRASI FUNGSI DENGAN METODE ATURAN SIMPSON
Marwoto

GAMBARAN KEPUASAN KERJA PERAWAT DI INSTALASI GAWAT DARURAT RS. UMUM UNIT
SWADAYA KABUPATEN DATI II SUMEDANG
Dessy Octarini

PERILAKU ADAPTIF PERAMBAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBANGUNAN HUTAN
KEMASYARAKATAN: STUDI KASUS DI HUTAN LINDUNG BUKIT DAUN DI KABUPATEN KEPAHANG
PROPINSI BENGKULU
Soengkono

INSPIRASI

Jurnal Ilmiah Multi Science

Vol. 17, No. 1, Maret 2008

DAFTAR ISI

- PLANNING PENGELOLAAN HUTAN MELALUI
PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN** □ 1 - 12
(Kajian Program HKm Dalam Perspektif Otonomi Daerah)
Suratman
- STRUKTUR USAHATANI CABAI (*Capsicum Annum*)
AKIBAT PENERAPAN TEKNOLOGI MULSA PLASTIK
HITAM PERAK DI KABUPATEN REJANG LEBONG** □ 13 - 18
Ririn Harini dan Jon Yawahar
- UJIAN NASIONAL TERHADAP KUALITAS KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR** □ 19 - 22
Hasmi Suyuthie
- PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN YANG
BERKELANJUTAN** □ 23 - 29
Hasanawi Dan Wismalinda Rita
- FENOMENA INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI
KEKAYAAN BARU ORGANISASI DALAM MENGHADAPI
TUNTUTAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN DI ERA
GLOBALISASI** □ 30 - 38
Yudi Partama Putra
- STUDI PENJAJAKAN DALAM UPAYA
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KOMUNITAS** □ 39 - 43
Purwaka
- POLA AMAR MA'RUF, MABADI KHAYRUL UMMAH
DAN PANCASILA** □ 44 - 50
Syamsul Huda
- PEMBERIAN MOTIVASI ADALAH SALAH SATU
FAKTOR PENTING DALAM MENCAPAI KEBERHASILAN
BAGI WARGA BELAJAR PENDIDIKAN NON FORMAL** □ 51 - 59
M. Ilham Abdullah

POLA AMAR MA'RUF, MABADI KHAYRUL UMMAH DAN PANCASILA

Oleh : Syamsul Huda*,

Pendahuluan

Hingga saat ini umat Islam di Indonesia, masih belum dapat merumuskan secara tuntas strategi perjuangan yang dipakai untuk mewujudkan cita-cita yang telah lebih dahulu ditetapkan, yaitu *I'la likalimatillah* dan *'izzul islam wa muslimin*. Strategi yang dimaksud adalah keseluruhan gugusan langkah dan pola perjuangan kolektif yang dilaksanakan oleh semua kelompok di lingkungan umat Islam. Dengan sendirinya, apa yang selama ini dikenal sebagai "perjuangan" lalu bersifat parsial (*juz'i*) dan menggunakan kwasi strategi (*syibhul istratiyyah*) yang tidak menjamin keberhasilan apa yang dituju.

Salah satu sebab utama adalah belum ada kesamaan arti apa yang dimaksud dengan kata "perjuangan" itu sendiri. Apakah wawasannya, sampai di mana ;lingkupnya, di manakah letak hakikatnya, sasaran konkret apakah yang hendak dicapai dengannya ? dalam keadaan demikian, tidak heran kalau pembagian kerja antara mereka yang melaksanakannya juga menjadi tidak jelas, dan sebagai akibat tidak mungkin muncul kepemimpinan yang akan mengarahkan "perjuangan" ke sasaran yang dituju. Antara satu dan lain sektor tidak ada kaitan yang dikembangkan secara berencana, bercirikan hubungan fungsional yang jelas dan memiliki titik kulminasi yang sama. "Perjuangan" yang dilakukan lalu berwatak sporadis, dan tidak memiliki kesamaan langkah antara begitu banyak bagian yang berserakan dan terlepas satu dari yang lain. Di sela-sela sekian banyak bagian "perjuangan" yang semua bergerak dengan kecepatan yang penuh itu, lalu terlepas celah-celah yang penuh kelemahan.

Kombinasi dari sekian banyak "bagian perjuangan" yang berlingkup begitu *massif* di satu pihak, dan kesadaran akan kelemahan begitu banyak di celah-celah kesemua bagian itu, akhirnya melahirkan situasi kejiwaan serba terpecah (*al-syakhsiyyat al-muqassamah, split personality*) di lingkungan umat Islam : di satu pihak merasa bangga dengan kekuatannya sendiri dan dengan itu mengajukan tuntunan-tuntunan mutlak kepada pihak lain (termasuk Negara), tetapi di pihak lain selalu merasa tersudut dan meminta perlindungan pihak luar itu sendiri dari berbagai hal yang dianggap menjadi gangguan dan dinilai merugikan 'kepentingan umat Islam". Situasi seperti itu kemudian beban moral sangat besar, yang semakin membuat cerai berainya kesatuan langkah yang sedikit banyak masih ada. Keadaan seperti itu, praktis berarti semakin berkepanjangannya lingkaran setan yang tidak berkeputusan antara sebab dan akibat.

Salah satu kategori yang penting dalam "perjuangan" yang dilakukan selama ini adalah apa yang dirumuskan sebagai kerja yang diamalkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Kerja ini adalah inti dari keseluruhan "perjuangan" yang dilakukan dan betapa banyak sekalipun kekurangan dalam pola dan cara melaksanakannya, namun ia

* Dosen Program Studi Sosiologi Fisipol Universitas Bengkulu

telah berhasil memberikan warna yang atas keseluruhan “perjuangan” itu sendiri. Arah “perjuangan” menjadi tetap lurus pada rel yang benar, karena *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi kesatuan langkah yang mencegah penyimpangan dari sasaran yang dituju.

Karena itu, salah satu tonggak perjuangan di masa datang adalah pengembangan prinsip *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam sebuah pola yang semakin meluas, meski bidang-bidang yang selama ini belum digarap. Namun, untuk memungkinkan pengembangan ‘konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang diperluas’ itu perlu pula ia dikaitkan dengan kerangka *mabadi khairiummah* (prinsip-prinsip kesejahteraan umat) yang juga masih memerlukan perumusan kembali lingkup dan jangkanya. dengan melaksanakan keduanya dalam sebuah kaitan yang jelas, maka sendi-sendi bagi sebuah strategi bagi sebuah perjuangan yang tuntas di masa depan telah diletakkan.

Pengkaitan *amar ma'ruf nahi munkar* dan *mabadi khairi umat* di atas, akan menghasilkan landasan perjuangan yang matang, jika diletakkan dalam sudut pandangan hubungannya dengan dasar Negara Pancasila. Pemikiran atas hubungan keduanya dengan Pancasila akan meletakkan landasan perjuangan umat Islam pada bumi nyata yang dihati bangsa Indonesia, bukannya sesuatu yang terlalu tinggi letaknya di awang-awang.

Kiprah yang Berwatak Universal

Liputan *amar ma'ruf nahi munkar* selama ini adalah pelaksanaan syari'at Islam secara tuntas, baik dalam kehidupan perorangan kaum muslimin maupun kehidupan berkelompok mereka. Liputan tersebut tidak hanya mengenai aktualitas perilaku mereka saja, melainkan menyangkut sarana yang mendukung perilaku itu, seperti rumah judi menjadi “garapan” nahi munkar di samping perbuatan berjudi itu sendiri. Termasuk dalam sarana tersebut adalah peraturan-peraturan kenegaraan dari kebiasaan masyarakat, di samping pranata-pranata lainnya (jaringan komonikasi massa, sistem perekonomian dan sebagainya)

Liputan seperti itu, tuntunannya sendiri atas ‘perjuangan’ yang dilakukan selama ini yaitu formalisasi ketentuan-ketentuan syari'at dalam semua sektor kehidupan kaum muslimin, termasuk kehidupan bernegara. Sikap yang ditimbulkan oleh kebutuhan akan formalisasi itu kemudian memberikan warna tersendiri pada ‘perjuangan’ yang dilakukan itu, yaitu watak eksklusif yang membatasi kiprah yang dijalani hanya bagi kepentingan kaum muslimin belaka, bukannya kepentingan nasional. Dengan sendirinya, mudah sekali timbul kesan bahwa ‘perjuangan Islam’ adalah ‘perjuangan golongan Islam’ belaka. Padahal, dalam kenyataan kiprah kaum muslimin meliputi semua segi, bidang dan sektor kehidupan, bahkan memiliki jangkauan keluar batas-batas tanah air mereka dan watak universal.

Demikian kuat kesan ini, tertanam di luar dan di dalam lingkungan umat Islam sendiri, sehingga sulit untuk menembusnya. Di dalam lingkungan umat Islam, umpamanya, sedikit sekali perhatian di beriakan oleh gerakan – gerakan Islam untuk me'nasional'kan diri bahkan sering timbul tuduhan ‘menyebrang’ atau ‘meninggalkan perjuangan islam’ jika tercapai keselarasan penuh antara aspirasi nasional dan aspirasi gerakan Islam yang berusaha me'nasional'kan diri itu. Dalam hal ini harus diperhitungkan akibat ‘pukulan balik’ (*backlash*) yang ditimbulkan oleh upaya pe'nasional'an diri yang berwatak oportunistik (*intihazi*), yang justeru menambah parahnya kesenjangan antara ‘aspirasi Islam’ dan ‘aspirasi nasional’ bangsa. Di lingkungan umat Islam, kesan akan kesenjangan tersebut lebih banyak diakibatkan oleh

sedikitnya pengertian akan hakikat keagamaan murni dari tuntutan pelaksanaan syari'at secara murni, apalagi apabila tuntutan itu diajukan secara militan dan 'bernada keras'.

Kenyataan di atas menuntut dari kita sebuah kesediaan untuk dengan kepala dingin mencari pelarian kesenjangan tersebut, sehingga dalam jangka panjang kepentingan umat Islam dapat diperluas menjadi kepentingan nasional, dan kepentingan nasional memasukkan ke dalam dirinya hal-hal yang dianggap kepentingan agama murni di pihak umat Islam.

Salah satu cara yang patut dipertimbangkan dalam hal ini adalah perluasan wilayah garapan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan meletakkan tekanan pada aspek-aspek kehidupan yang selama ini sedikit sekali disentuh sebagai 'garapan agama'. Ini berarti perumusan kembali wawasan *amar ma'ruf nahi munkar* itu sendiri. Selama ini, secara tidak sadar *amar ma'ruf nahi munkar* senantiasa diletakkan dalam kerangka 'mekanisme penghalalan dan pengharaman' belaka. *Amar ma'ruf* dioperasionalkan dalam hal-hal yang diwajibkan dan disayogyakan (disunnahkan) oleh syari'ah, sedangkan nahi munkar dalam hal-hal yang dilarang. Dijahui, dan tidak disayogyakan. Watak pendekatan ini adalah *legalistic* dan *formalistic*, yaitu sekedar mengukur keadaan atau sesuatu hal dari pandangan formal Islam belaka, yang tidak termasuk jangkauan hal-hal formal, tidak digarap sebagai bagian dari kehidupan beragama.

Padahal, sebenarnya ada sebuah kerangka lain yang dapat menampung operasionalisasi prinsip *amar ma'ruf*, dan dengan sendirinya juga nahi munkar, yaitu di bidang perumusan konsepsi kemasyarakatan. Garapan di 'wilayah baru' ini ternyata memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat *legalistic* dan *normative* belaka, melainkan juga dimensi falsafi, ekonomis, budaya, politik/ideologi dan seterusnya. Sebenarnya kaum muslimin di masa lampau pernah mencoba menyediakan jembatan dan jalan pintas ke arah perluasan multi-dimensional tersebut, yaitu ketika para sarjana ilmu-ilmu syari'ah menulis tentang falsafat hukum (*falsafah al-tasyri'*), hikmah perundangan (*hikmah al-tasyri'*) dan sebagainya. Menurut Wahid, upaya itu tidak terus berlanjut secara menetap, melainkan berkembang secara sporadis dan meloncat-loncat.

Perluasan, cakrawala *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* menjadi wilayah garapan multi-dimensional di atas, akan berlangsung lebih baik dan lebih matang kalau dikaitkan dengan perumusan kembali *mabadi khairi ummah*. Prinsip-prinsip kesejahteraan umat yang umum diikuti sekarang, selayaknya digali lebih mendalam akar-akarnya. Prinsip umum pengaturan kehidupan yang lima (*al-kulliyat al-khams*) yang berupa jaminan akan keselamatan nyawa (jiwa), agama, keluarga, harta benda, dan pekerjaan, seharusnya diteropong lebih jauh tumpuan idialitasnya, yaitu dalam jawaban atas sejumlah pertanyaan dasar berikut :

- 1) Apakah watak pengaturan kehidupan kemasyarakatan dalam Islam, egalitariankah atau elitis ? Apakah implikasi lebih jauh dari pilihan watak sosial yang diambil ?
- 2) Apakah hubungan dasar antara perorangan warga masyarakat dan masyarakatnya, hubungan kulturalkah, (warga adalah pembentukan masyarakat secara penuh) atau strukturalkah (masyarakat adalah penentu perilaku perorangan warganya) ?
- 3) Bagaimana hubungan antara keimanan, teknologi, dan ilmu pengetahuan diatur di dalamnya, masing-masing dengan otonomi sendiri ataukah ada saling ketergantungan antara kegitanya ?
- 4) Bagaimanakah hubungan antara Islam sebagai pandangan hidup dan faham/ideology lain diatur, secara komplementer atau dalam pola subordinatif ? Kalau subordinatif, pandangan hidup Islam kemudian menjadi supra-struktural ataukah sub-struktur bagi faham/ideology lain itu ?

Kalau komplementer, bagaimanakah dilakukan pengkaplingan wilayah masing-masing tanpa saling mengganggu, namun tidak terputus hubungan antara keduanya ?

Pilihan-pilihan yang diambil berdasarkan jawaban deretan pertanyaan di atas akan membentuk gugusan pengertian tentang prinsip umum pengaturan kehidupan bermasyarakat yang melandasi *badi' khair ummah*. Gugusan yang utuh dan bulat, tanpa ada kontradiksi (*ta'arudh wa tanqudh*) internal di dalamnya, akan memungkinkan pembentukan rangkaian prinsip-prinsip penyelenggaraan kesejahteraan umat (*mabadi khair ummat*).

Dalam hal ini firman Allah "Kalian adalah sebaik-baik umat (yang diciptakan bagi (keseluruhan) umat manusia. (karena) kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar" Akan memperoleh penafsiran baru yang selama ini belum pernah difikirkan:"sebuah masyarakat egalitarian (berazaskan persamaan hak secara prinsipil), yang di dalamnya warga masyarakat penunjang strukturnya dan teknologi, ilmu pengetahuan, dan agama saling berketergantungan satu sama lain dan Islam bersikap menyantuni dan terbuka terhadap faham/ideology lain di luar dirinya sendiri, atau justru sebaliknya. Pilihan pertama di atas dengan sendirinya menuntut penataan masyarakat dalam pola-pola wawasan, kelembagaan dan hubungan tertentu, dengan segala implikasinya bagi struktur pemerintahan dan sistem perekonomian serta arah pendidikan di dalamnya. Demikian pula jika diambil pilihan kedua.

Model teoritik dari masyarakat yang dipilih itu kemudian dapat dibuat secara skematik, yang selanjutnya secara konseptual akan memunculkan sejumlah prinsip penyelenggaraan kesejahteraan umat (*madi khair ummat*). Prinsip-prinsip tersebut lah yang akan menjadi titik tolak pertama dalam penyusunan sebuah strategi perjuangan yang tuntas dan menyeluruh, dengan ketentuan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting berikut :

- 1) Strategi penyusunan dan pengembangan serta pembinaan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tersebut haruskan dilakukan dari bawah, atau oleh kelompok inti' tertentu, yang akhirnya akan menentukan corak kepemimpinan perjuangan ummat?
- 2) Adakah di dalam strategi mekanisme untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan, jika terjadi kemacetan 'konseptual' maupun 'institusional' dalam strategi itu sendiri ?
- 3) Bagaimanakah penahapan perjuangan dilakukan, sambil berjalan ataukah mengikuti sebuah pola multi-tahap (*a multi-stage pattern*) yang ketat ? Bentuk konkrit kelembagaan perjuangan berdasarkan strategi tersebut, jika pola multi-tahap yang digunakan akan bersifat lenturkah atau menetap ?

Pembidangan kerja atas bermacam-macam wilayah kerja akan sangat bergantung bentuk dan coraknya kepada bentuk model teoritik dan strategi yang disusun dari model di atas.

Tuntutan Disiplin Sosial

Perluasan cakrawala kerja melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan jalan memasukkan ke dalam sebuah gugusan prinsip penyelenggaraan kesejahteraan umat yang akan memunculkan model teoritik dan strategi perjuangannya sendiri, seperti digambarkan di atas, mau tidak mau harus disilangkan dengan implikasi dari kenyataan bahwa kita adalah sebuah Negara yang berdasarakan ideology Pancasila. Kalau hal ini tidak diperhitungkan, maka model dan strategi perjuangan yang digunakan untuk mewujudkan sasarannya akan menjadi model dan strategi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya perjuangan Islam di Indonesia di masa depan.

Beberapa hal harus dijadikan pegangan dalam menyilangkan kerja *amar ma'ruf nahi munkar* dan *mabadi khairi ummat* itu dengan kenyataan bahwa Negara kita berideologi Pancasila :

- 1) Tuntutan akan ketuntasan pelaksanaan syari'at harus ditujuakan kepada diri kita sendiri, bukan kepada peraturan dan perundang-undangan pemerintah. Ini berarti tuntutan akan disiplin sosial lebih besar di kalangan kaum muslimin sendiri, untuk melaksanakan ajaran agama mereka tanpa dorongan dan dukungan pemerintah. Semua agama lain di negeri kita juga 'bernasib' demikian, namun mereka menghadapi kesulitan lebih sedikit, karena tuntutan sya'at bagi mereka jauh lebih sedikit, kalau bukannya dikatakan tidak ada;
- 2) Kebijaksanaan nasional pemerintah dalam banyak bidang tentu tidak dapat diharapkan akan disusun dan dirumuskan pertimbangan keagamaan, apalagi pertimbangan menurut ajaran agama Islam. Dalam keadaan demikian, maka harus dikembangkan kemampuan untuk tetap pada pendirian semula, tanpa menekankan perbedaan dengan kebijaksanaan nasional yang diambil pemerintah itu. Salah satu cara menghidupkan konfrontasi langsung itu adalah membedakan antara ajaran Islam dan kepentingan umat Islam. Kasus penghapusan liburan sekolah dalam bulan Ramadhan, umpamanya, merupakan 'uji coba, menarik dalam hal ini;
- 3) Proses domestikasi atau 'mempribumikan' Islam harus dituntaskan di segala bidang, yang berarti penghentian arus semakin deras sekarang ini untuk berkiblat ke Timur Tengah dan arus Arabisasi harus ditekan ke titik sekecil mungkin. Dalam keadaan merasa terdesak, memang dapat dimengerti kemudian muncul kecenderungan akan solidaritas semakin kokoh dengan 'saudara-saudara senasib' di negeri-negeri lain, yang mendasari pengiblatan sikap kita ke Timur Tengah dan arus Arabisasi yang semakin kuat. Namun, kecenderungan dan arus seperti itu justru akan semakin menjauhkan kita dari identifikasi kiprah kaum muslimin dalam kerangka memperjuangkan kepentingan nasional. Betapa tercepit atau terdesaknya keadaan kita secara politis dan cultural, kita harus bertahan pada kiprah nasional kita yang dirumuskan bersama-sama orang lain yang tidak seiring dan seperjalanan dalam mewujudkan cita-cita menegakkan ajaran Islam di bumi nusantara;
- 4) Kita justru harus berusaha memegang kepeloporan dalam mengarahkan kembali kehidupan bangsa dari beberapa kecenderungan yang membahayakan seperti berikut:
 - (a) Semakin besarnya arus ke arah birokratisasi kehidupan bangsa di segala bidang, dalam bentuk semakin besarnya bagian yang diambil aparat pemerintahan dalam pembangunan nasional dan semakin kecilnya peranan pihak swasta (kecuali dalam perniagaan), suatu hal yang membahayakan kelangsungan pembangunan nasional itu sendiri dan pelestarian hasil-hasilnya;
 - (b) Semakin besarnya kecenderungan untuk melihat kepentingan nasional secara sesisi saja yaitu identifikasi kepentingan aparat pemerintah sebagai kepentingan nasional dalam skala yang semakin lama semakin meningkat;
 - (c) Semakin besarnya rasa saling curiga mencurigai antara berbagai golongan dan kelompok di masyarakat, yang berakibat pada beberapa perkembangan salah yang mencemaskan : meningkatnya tindak kekerasan dalam kehidupan bangsa, seolah-olah kekerasan kini telah membudaya di semua bidang. Akibat lain dari suasana saling mencurigai itu, yang baru terasa dalam jangka panjang adalah kesetian semakin besar untuk mencapai kesamaan pandangan tanpa

campurtangan aparat pemerintah. Ini berarti semakin sulitnya dicapai konsensus nasional dalam artiannya yang dinamis dan kreatif, melainkan 'dicukupkan' dengan jasa-jasa baik minimal dari pihak aparat pemerintahan tersebut, atau dengan kata lain kita semakin terbiasa untuk hidup berdasarkan konsensus minimal yang dapat diraih dan kehilangan saling pengertian optimal. Ini sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa di kemudian hari.

Matangkan Wawasan Kultural

Penjadwalan beberapa jenis kegiatan utama berikut diusulkan di bawah ini, untuk melakukan kiprah ber-amar *ma'ruf nahi munkar* dalam kerangka *mabadi khairi ummah* dalam hubungan keduanya dengan kenyataan adanya Pancasila sebagai ideology Negara dan bangsa. Jenis-jenis kegiatan utama itu adalah :

- (1) Semakin mematangkan wawasan kultural umat Islam, dengan membuka diri sejauh mungkin bagi dialog dengan pihak-pihak lain dan mencoba memahami sejauh mungkin aspirasi yang hidup di kalangan mereka;
- (2) Semakin mendewasakan kehidupan internal umat Islam, dengan menyiasati perumusan kebutuhannya sendiri dari berbagai sudut pandangan dan wawasan sektoral, di luar kebutuhan *legalistic* yang dirasakan oleh 'pendekatan formalistik' dari sudut pandang ajaran islam belaka;
- (3) Memulai kerja-kerja rintisan berikut:
 - (a) mengembangkan budaya politik yang benar-benar demokratik, dengan jalan mengembangkan bentuk musyawarah yang jangkauannya semakin luas di kalangan warga gerakan-gerakan Islam sendiri dalam mengambil keputusan dikatakan semakin meluas, karena bentuk musyawarah selama ini terlalu ditekankan pada tingkat antar pimpinan belaka dan antara pimpinan antara gerakan belaka, sehingga sebenar-benarnya angauta gerakan peraktis tidak turut mengambil keputusan.
 - (b) Merintis pembentukan lembaga-lembaga sosial ekonomi (*social-economic enterprises*) yang berwatak kolektif di tingkat bawah, dalam ukuran sangat kecil dan dalam kerangka mikro, guna menumbuhkan kemandirian bangsa di bidang ekonomi yang semata-mata disandarkan pada mekanisme pasar dewasa ini;
 - (c) Mengisi mata rantai yang hilang dalam sistem pendidikan nasional kita, yaitu menumbuhkan kesediaan masyarakat untuk melakukan sendiri kerja mendidik, di samping sekolah dan keluarga. Kerja mendidik oleh masyarakat ini dapat mengambil bentuk bermacam-macam, mulai dari jaringan pengajian umum, hingga ke latihan-latihan kerja magang (*apprenticeship*) dalam lapangan usaha yang beraneka ragam;
 - (d) Membentuk jaringan komunikasi modern (melalui media massa) maupun mengembangkan dan mendinamisasikan jaringan komunikasi tradisional yang sudah dimiliki selama ini, guna meratakan pandangan tentang pembangunan nasional dalam segala aspeknya dan saling memperkenalkan kiprah masing-masing di dalamnya serta memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi pembangunan nasional itu sendiri secara bersama-sama;

Apa yang digambarkan di atas sudah jelas bukan merupakan pemecahan fundamental bagi masalah-masalah yang dihadapi umat Islam dalam melaksanakan amar *ma'ruf nahi munkar*, melainkan setidaknya-tidaknya telah memberikan kemungkinan untuk mengaitkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan prinsip-prinsip

yang menjadi pegangan bangsa, yaitu *mabadi khairi ummah*. Dari kerja mengaitkan antara visi ideal kemasyarakatan dan langkah-langkah praktis untuk mewujudkan visi itu sendiri akan terbuka kemungkinan untuk merumuskan kembali doktrin Islam dan meletakkannya dalam lingkup lebih luas dan cakrawala yang jauh menatap masa depan.

Penutup

Ada sebuah kerangka yang dapat menampung operasionalisasi prinsip *amar ma'ruf*, dan dengan sendirinya juga nahi munkar, yaitu di bidang perumusan konsepsi kemasyarakatan. Garapan di 'wilayah baru' ini ternyata memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat *legalistic* dan *normative* belaka, melainkan juga dimensi falsafi, ekonomis, budaya, politik/ideologi dan seterusnya

Perluasan, cakrawala *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* menjadi wilayah garapan multi-dimensional di atas, akan berlangsung lebih baik dan lebih matang kalau dikaitkan dengan perumusan kembali *mabadi khairi ummah*. Prinsip-prinsip kesejahteraan umat yang umum diikuti sekarang, selayaknya digali lebih mendalam akar-akarnya. Prinsip umum pengaturan kehidupan yang lima (*al-kulliyat al-khams*) yang berupa jaminan akan keselamatan nyawa (jiwa), agama, keluarga, harta benda, dan pekerjaan.

Mudah-mudahan kerja seperti itu dapat dilakukan secara tuntas, dengan ridha Allah, petunjuk dan pertolongan-Nya

Daftar Pustaka

- Ali Yafi. 1994. *Menggagas Fikih Sosial*. Mizan. Bandung.
- Andree Feillard. Et.al. 1994. *Gusdur dan Masyarakat Sipil*. LKiS. Yogyakarta.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam rasional Gagasan dan Pemikiran*, Mizan. Bandung.
- Parera, Frans M, dan Koekerits, Jakob T. *Gusdur Menjawab Perubahan Zaman*, Kompas. Jakarta. 1999.
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, KLiS, Yogyakarta, 1994.
- Wahid, Abd.Rahman. "Arah dan Pola Perjuang Da'wah", *Panjimasyarakat*, No.408, Tahun XXV—14 Zulhijjah 1403H, 21 September 1983
- Yahya. Omar Toha 1983. *Ilmu Da'wah*, Widjaja. Jakarta.